

PENINGKATAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG, Agris Ruseno, Jazuli Akhmad 426 – 443

OPTIMALISASI KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN, Bilaludin Bilaludin, Muhammad Mathori 444 – 455

ANALISIS KINERJA PEGAWAI BALAI KONSERVASI BOROBUDUR, Dwi Wahyanto, Suci Utami Wikaningtyas 456 – 475

PENINGKATAN NETRALITAS PEJABAT BIROKRASI ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI KABUPATEN MAGELANG, Endro Yuwono, Meidi Syaflan 476 – 485

ANALISIS INVESTASI PENGADAAN ALAT GAMMA CAMERA DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA, Heru Satria Gama, Wahyu Purwanto 486 – 506

EVALUASI KETIDAKSESUAIAN PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Jatu Rahmawati, Dwi Novitasari 507 – 524

UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020, Joko Wahyudi, Nur Widiastuti 525 – 541

PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING, Putri Rizki Amalia, Uswatun Chasanah 542 – 571

ANALISIS EFISIENSI EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA MAGELANG, Rendi Yuliantoro, Priyastivi Priyastivi 572 – 594

PENGARUH PENEMPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DISPARPORA KABUPATEN MAGELANG, Tabita Widyawati, Muhammad Awal Satrio Nugroho 595 – 620

PENGARUH KOMPENSASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAPAS KELAS I YOGYAKARTA, Tri Handoyo, Syeh Assery 621 – 631

HOME / ARCHIVES / Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Riset Manajemen

Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Riset Manajemen



DOI: <https://doi.org/10.32477/jurima.v2i3>

PUBLISHED: 2024-05-06

ARTICLES

PENINGKATAN KEDISIPLINAN MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG

Agris Ruseno, Jazuli Akhmad 426 – 443



OPTIMALISASI KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

Bilaludin Bilaludin, Muhammad Mathori 444 – 455



ANALISIS KINERJA PEGAWAI BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

Dwi Wahyanto, Suci Utami Wikaningtyas 456 – 475



PENINGKATAN NETRALITAS PEJABAT BIROKRASI ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DI KABUPATEN MAGELANG

Endro Yuwono, Meidi Syafan 476 – 485



ANALISIS INVESTASI PENGADAAN ALAT GAMMA CAMERA DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA

Heru Satria Gama, Wahyu Purwanto, Prafidhya Dwi Yulianto 486 – 506



EVALUASI KETIDAKSESUAIAN PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jatu Rahmawati, Dwi Novitasari 507 – 524



UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA FISIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

Joko Wahyudi, Nur Widiastuti 525 – 541



PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Putri Rizki Amalia, Uswatun Chasanah 542 – 571



ANALISIS EFISIENSI EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Rendi Yuliantoro, Priyastiyi Priyastiyi 572 – 594



PENGARUH PENEMPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DISPARPORA KABUPATEN MAGELANG

Tabita Widyawati, Muhammad Awal Satrio Nugroho 595 – 620



PENGARUH KOMPENSASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SERTA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAPAS KELAS I YOGYAKARTA

Tri Handoyo, Syeh Assery 621 – 631



- Make a Submission
- INFORMATION
 - For Readers
 - For Authors
 - For Librarians
- EDITORIAL POLICIES
 - Publication Ethic
 - Editorial Team
 - Reviewer
 - Focus and Scope
 - Author Guidelines
 - Peer Review Process
 - Publication Frequency
 - Publication fee
 - Plagiarism Checker
 - Copyright Notice
 - Open Access Policy
 - Ethical Statement
 - Publisher
- ARTICLE TEMPLATE



ISSN

3026-0469



TOOLS



INDEXING LIST



Support By



VISITORS



UPAYA PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA FISIK PEMERINTAH KABUPAEN MAGELANG TAHUN 2020

Joko Wahyudi¹, Nur Widiastuti²

¹STIE Widya Wiwaha

Abstract

This research was carried out in the Development Administration Section of the Regional Secretariat of Magelang Regency by taking the object of the physical realization of the Magelang Regency Government which was supervised by 60 Regional Apparatus and Sections. This study aims to determine the physical achievements of the Magelang Regency Government that have not been optimal and find solutions to solve them. This study uses a qualitative descriptive method with the analyzed data consisting of primary data in the form of answers to observations and interviews and secondary data in the form of the Strategic Plan for Development Administration of the Regional Secretariat of Magelang Regency. The results of this study can be seen the causes of the non-optimal physical achievements of the Magelang Regency Government in 2020th, namely human resources in making a planning system for activities and inadequate infrastructure, changes in regulations, and external factors from the Regional Apparatus Work Unit such as failed auctions. To improve the physical achievements of the Magelang Regency Government in 2020th, it is necessary to increase the capacity of human resources, improve facilities and infrastructure, make policies that support the process of accelerating activities, supervise SKPD with low physical performance, and SKPD to carry out internal control and routine coordination. with related parties.

Keywords: Efforts to Improve Physical Performance Achievement of the Magelang Regency Government

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 diharapkan memenuhi 5 T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat. Untuk mencapai 5 T tersebut perlu manajemen kegiatan yang baik dan efektif, sejak dari perencanaan, pengorganisasian sampai pelaksanaan.

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan agar dapat menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk dapat meminimalisasi hambatan pelaksanaan selama kegiatan berlangsung, sedangkan pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban administrasi atas pelaksanaan kegiatan.

Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) terpadu merupakan salah satu sistem pengendalian kinerja fisik dan keuangan tingkat kabupaten yang capaian kinerjanya ditentukan oleh capaian 60 Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai media komunikasi Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah dalam menyampaikan realisasi kegiatan. Rakor POK dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun diikuti oleh semua Kepala Perangkat Daerah dan instansi vertikal, dipimpin langsung oleh Bupati/ Wakil Bupati dengan pendamping Sekretaris Daerah, Asisten Ekbang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektur. Hasil pengendalian pembangunan dan laporan bulanan digunakan sebagai bahan Rakor Pimpinan. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Rakor Pimpinan. Jika dipandang perlu, terhadap hasil pembahasan dalam Rakor Pimpinan tersebut dilanjutkan dengan *desk* dan peninjauan lapangan.

Pengendalian kinerja atas pelaksanaan APBD dilakukan melalui pengendalian internal, pengendalian eksternal maupun pengendalian terpadu. Salah satu bentuk pengendalian terpadu adalah dilakukannya Rapat Koordinasi Pimpinan di tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Kabupaten. Instrumen Rakor Pimpinan yang sangat penting adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) yang disusun Perangkat Daerah setiap bulan.

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Perangkat Daerah sebagai instrumen penilaian capaian kinerja fisik dan keuangan tingkat kabupaten merupakan laporan yang disusun berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah terhadap target capaian yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO).

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) merupakan salah satu laporan yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lebih dalam, merupakan salah satu aspek penilaian kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan RFK yaitu ketika perangkat daerah menghitung Realisasi Fisik. Realisasi fisik dihitung sama dengan realisasi keuangan. Hal ini tentu kurang tepat, mengingat realisasi keuangan dibuat berdasarkan pertanggungjawaban keuangan, sedangkan pertanggungjawaban keuangan baru dapat dilaksanakan bila suatu kegiatan telah selesai dilaksanakan. Sehingga terdapat suatu simpulan singkat bahwa dalam periode yang sama, adanya realisasi keuangan pasti ada realisasi fisik, namun adanya realisasi fisik belum tentu diikuti realisasi keuangan.

Adapun gambaran antara target fisik dengan realisasi fisik di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Fisik Kabupaten Magelang Pertahun

Tahun	Target fisik (%)	Realisasi fisik (%)	Deviasi (%)
2017	100	92.43	7.57
2018	100	97.07	2.93
2019	100	97.07	2.93
2020	100	93.35	6.65

Sumber : LKPJ Bupati Tahun 2018, 2019 dan 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja fisik Kabupaten Magelang dari tahun 2017 sampai pada tahun 2020 terjadi selisih yaitu pada tahun 2017 target fisik 100 % terealisasi 92.43 %, tahun 2018 target fisik 100 % realisasi 97.07 %, tahun 2019 target fisik 100 tercapai 97.07 %, dan tahun 2020 target 100 % tercapai 93.35 %. Dari realisasi di atas, dapat menjadi gambaran pada Pemerintah Kabupaten Magelang harus mempunyai komitmen organisasi yang tinggi dalam menyelesaikan tugas yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Realisasi fisik untuk tahun 2020 apabila dijabarkan perbulan, maka akan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

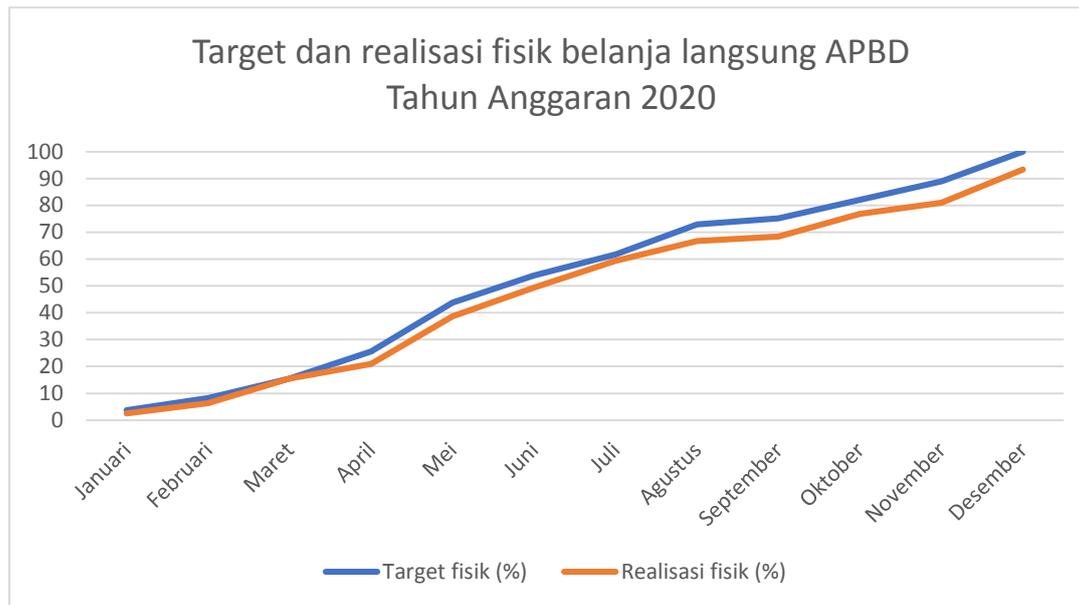
Tabel 1.2
Capaian Kinerja Fisik Perbulan Tahun 2020 Kabupaten Magelang

Bulan	Target fisik (%)	Realisasi fisik (%)	Deviasi (%)
Januari	3.67	2.53	- 1.14
Februari	8.27	6.34	- 1.93
Maret	15.46	15.50	+ 0.04
April	25.56	20.97	- 4.59
Mei	43.73	38.66	- 5.07
Juni	53.90	49.36	- 4.54
Juli	61.74	59.40	- 2.34
Agustus	72.95	66.74	- 6.21
September	75.22	68.44	- 6.78
Oktober	82.12	76.81	- 5.31
November	88.93	80.96	- 7.97
Desember	100	93.35	- 6.65

Sumber : Rekapitulasi laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa capaian fisik kabupaten magelang pada tahun 2020 pada umumnya mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember terdapat deviasi negatif yang artinya bahwa realisasi tidak sesuai target yang ditetapkan. Khusus untuk bulan Maret mengalami kelebihan dari target yang ditetapkan sebesar 15,46 % tercapai 15,50 % dengan deviasi positif sebesar 0,04 %.

Gambar 1.1



Sumber : Rekapitulasi laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2020

Dari latar belakang di atas, penelitian tentang upaya peningkatan capaian kinerja fisik pada Kabupaten Magelang yang direkapitulasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Magelang penting dilakukan.

LANDASAN TEORI

Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Amir Syamsudin. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Penjelasan UU Pemda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Dalam daerah ini pemerintahan melakukan tugasnya sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kinerja

Membahas mengenai masalah kinerja tentu tidak terlepas dari proses, hasil dan daya guna. Dalam hal ini kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja, seperti lingkungan kerja, kelengkapan kerja, budaya kerja, motivasi, kemampuan pegawai, struktur organisasi, kepemimpinan dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengkaji kinerja tidak lepas dari beberapa teori yang berhubungan dengan kinerja sebagaimana diuraikan berikut ini. Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (www.wikipedia.com).

Dwiyanto (2006: 47) menjelaskan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran suatu organisasi dalam mencapai visinya. Menurut Dwiyanto (2006: 49) penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas dan responsibilitas.

Realisasi

Realisasi adalah langkah penting dalam setiap perencanaan. Betapa sering kita lihat rencana hebat yang tidak menghasilkan apa-apa karena tidak pernah direalisasikan. Atau walaupun direalisasikan akan tetapi tidak sesuai dengan rencana atau asal-asalan sehingga hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan. Istilah realisasi digunakan dalam berbagai bidang dan lain sebagainya, untuk mengetahui seberapa besar pencapaian yang telah diraih untuk kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa pengertian realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Dimulai dari cita-cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian baru rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata.

Pengertian realisasi fisik dan keuangan adalah pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan segala aktivitas konstruksi dan proyeksi dana keuangan di masa mendatang sesuai dengan alokasi dananya.

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) merupakan salah satu laporan yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah

(OPD). Lebih dalam, merupakan salah satu aspek penilaian kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa APBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa Anggaran daerah harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa Anggaran daerah harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.

6. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas mengandung arti bahwa Anggaran daerah menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah.

Komitmen Organisasi

Komitmen terhadap organisasi sebagai sifat hubungan seorang individu dengan organisasi yang memungkinkan seseorang mempunyai keterikatan yang tinggi. Jadi, komitmen meliputi hubungan antara karyawan dengan organisasi di mana karyawan tersebut bersedia memberikan sesuatu atas kemauan sendiri agar dapat menyokong tercapainya tujuan.

Steers (dikutip dalam Gary Dessler, 1992 : 319-321), mendefinisikan komitmen organisasional sebagai kekuatan relative dari suatu sifat seseorang dengan dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu, di mana hal tersebut mempunyai 3 (tiga) faktor yaitu :

1. Kepercayaan dan penerimaan terhadap nilai serta tujuan organisasi.
2. Kesadaran dalam mengarahkan usahanya terhadap organisasi..
3. Keinginan kuat untuk menjadi anggota organisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif melalui studi atau kajian pada fokus tertentu, sehingga peneliti berharap memperoleh data yang relatif lengkap dan mendalam, juga bisa dilakukan interpretasi terhadap berbagai fenomena yang ditemui di lapangan dengan desain penelitiannya deskriptif. Masalah yang diteliti dan diselidiki oleh peneliti deskriptif kualitatif mengacu pada studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional satu unsur Bersama unsur lainnya.

Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian atau kesalahpahaman makna terhadap istilah-istilah dalam penelitian ini perlu dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) adalah kertas kerja yang menggambarkan kondisi realisasi fisik dan keuangan terhadap target yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Rencana Kerja Operasional (RKO) adalah rencana kerja yang menggambarkan dasar umum pelaksanaan kegiatan dan rencana waktu (*time schedule*) penyelesaian pekerjaan.

Sumber Data dan Narasumber

Sumber data dan informan dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Data

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu jawaban atas observasi dan wawancara.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung namun melalui media perantara. Peneliti memperoleh data

sekunder dari arsip data dan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Magelang.

b. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) 3 (tiga) orang dari Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- 2) 1 (satu) orang dari Bappeda dan Litbangda
- 3) 1 (satu) orang dari Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah
- 4) 1 (satu) orang dari Inspektorat

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung 3 bulan yaitu bulan April 2021 sampai Juni 2021 adapun lokasi penelitian yaitu Sekretrariat Daerah khususnya pada Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Magelang Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid.

Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sesuai tujuan penelitian, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Mengamati kinerja fisik Pemerintah Kabupaten Magelang, menemukan masalah-masalah, dan menemukan upaya penyelesaian masalah maupun ketegangan-ketegangan. Adapun data yang digunakan untuk melakukan observasi ini adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2020 dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dari berbagai arsip yang dimiliki oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Magelang. Dokumentasi di simpan dalam bentuk foto dan video pada saat wawancara.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Untuk mengolah dan menganalisis data digunakan data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang meliputi empat komponen, diantaranya :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

c. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan, sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisa Data

Berdasarkan hasil wawancara mengenai capaian kinerja fisik Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap beberapa informan adalah sebagai berikut :

Pertanyaan :

1. Apakah terjadi ketidaksesuaian antara target fisik yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja fisik setiap bulannya ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan capaian kinerja fisik tidak sesuai target yang ditetapkan setiap bulannya atau dikatakan belum optimal ?

Jawaban :

a. Informan 1

Neneng Sutanti, SE, MM, Jabatan Kasubag Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda, wawancara pada tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Bagian Administrasi Pembangunan Setda, menyatakan bahwa :

“Pada Pemerintah Kabupaten Magelang, untuk tahun 2020 dan sebelumnya memang ada ketidaktercapaian kinerja fisik

terhadap target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu perencanaan pelaksanaan kegiatan tidak disesuaikan dengan anggaran kas yang tersedia. Juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan. Kemampuan sumber daya manusia sangat menentukan kinerja fisik perangkat daerah yang secara langsung akan mempengaruhi kinerja fisik Pemerintah Kabupaten Magelang.”

b. Informan 2

Nur Arifin, S. Kom, jabatan fungsional khusus pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPPKAD), wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 bertempat di BPPKAD, menyatakan bahwa :

“Seringnya terjadi ketimpangan antara realisasi fisik dengan target fisik disebabkan karena adanya regulasi yang memaksakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan sesuatu yang mendesak. Sebagai contoh adanya regulasi yang membuat instrument dalam pencairan dan percepatan kinerja fisik berubah yaitu penggunaan aplikasi baru yang belum dikuasai oleh sumber daya manusia. Berubahnya instrument dalam kegiatan pencairan akan mempengaruhi perolehan uang muka sehingga kegiatan fisik akan mundur sampai dengan dicairkannya uang muka kegiatan tersebut”

c. Informan 3

Nanik Murgiyanti, S. Sos, Jabatan Fungsional Auditor Madya pada Inspektorat, wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 bertempat di Inspektorat, menyatakan bahwa :

“Memang selama ini dalam pantauan kita bahwa capaian kinerja fisik Kabupaten Magelang tidak sesuai target. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya fasilitas yang mendukung kegiatan, juga pada awal triwulan masih menyiapkan time schedule yang tepat dalam waktu setahun ke depan, dan kurangnya persiapan personil yang ditunjuk dalam pelaksanaan kegiatan atau SDM yang kurang mendukung.”

d. Informan 4

Farida Nurul Aini, ST, M. Eng, Jabatan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda, wawancara pada tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Bagian Administrasi Pembangunan, menyatakan bahwa :

“Seringkali terjadi dalam setiap bulan atau tribulan kita jumpai dalam RAKOR POK bahwa realisasi kinerja fisik Pemerintah Kabupaten Magelang di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu SKPD dalam menetapkan target fisik dalam Rencana Kerja Operasional yang kurang akurat, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal, atau sebab eksternal yang diluar kendali SKPD pengampu seperti gagal lelang atau penyedia yang tidak bisa memenuhi target /jadwal.”

e. Informan 5

Sulistyo Yuwono, SH, Jabatan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan setda, wawancara pada tanggal 23 Juni 2021 bertempat di Bagian Administrasi Pembangunan, menyatakan bahwa :

“Dalam rakor POK saya sampaikan bahwa capaian kinerja fisik kabupaten tidak sesuai target, hal ini disebabkan kurang efektifnya pengendalian dan evaluasi, perencanaan masing-masing SKPD, terutama penyusunan RKO yang masih belum matang dan sumber daya manusia dari sisi kemauan, biasanya pekerjaan dianggap tidak penting.”

f. Informan 6

Arif Yulianto, ST, Jabatan Kasubid Fispra pada Bappeda dan Litbangda, wawancara pada tanggal 23 Juni 2021 bertempat di Bappeda dan Litbangda, menyatakan bahwa :

“Kinerja fisik identik dengan pembangunan fisik dikarenakan pembangunan secara fisik inilah yang mempengaruhi capaian kinerja fisik kabupaten. Penyebab lambatnya kinerja fisik kabupaten yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam membuat perencanaan. Perencanaan sering kali dianggap hal biasa sehingga rawan terjadi pengingkaran dari jadwal dan target”.

Berdasarkan pendapat dari informan di atas diketahui bahwa pada Pemerintah Kabupaten Magelang seringkali terjadi kesenjangan antara realisasi kinerja fisik dengan target fisik yang telah ditetapkan dengan beberapa faktor penyebab, yaitu :

- 1) Sumber daya manusia dalam membuat sistem perencanaan kegiatan belum memadai dan menguasai kegiatan atau kemampuan untuk menyelesaikan kegiatan.
- 2) Sarana dan prasarana belum memadai,
- 3) Perubahan regulasi yang menyebabkan penyesuaian dalam batas waktu singkat sehingga menyebabkan Sumber daya manusia dan sarana prasarana tidak siap.
- 4) Masih ada faktor eksternal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti adanya gagal lelang.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, ada beberapa upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja fisik, sesuai dengan pertanyaan di bawah ini :

- 1) Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja fisik agar sesuai target yang telah ditetapkan ?

Jawaban :

a. Informan 1

Neneng Sutanti, SE, MM, Jabatan Kasubag Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda, wawancara pada tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Bagian Administrasi Pembangunan Setda, menyatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja fisik agar sesuai target yang ditetapkan adalah dengan mematangkan perencanaan/ menyesuaikan target pelaksanaan dengan anggaran kas yang tersedia dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan kalangan sendiri atau juga melalui Pendidikan dan pelatihan..”

b. Informan 2

Nur Arifin, S. Kom, jabatan fungsional khusus pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPPKAD), wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 bertempat di BPPKAD, menyatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan untuk agar realisasi kinerja fisik sesuai target yang ditetapkan adalah segera membuat kebijakan tingkat daerah melalui koordinasi pusat seperti mencari jalan tengah yang tidak melanggar. Penggunaan aplikasi pilihan sebagai solusi dari ketidaknyamanan aplikasi penganggaran dan pencairan yang baru”.

c. Informan 3

Nanik Murgiyanti, S. Sos, Jabatan Fungsional Auditor Madya pada Inspektorat, wawancara pada tanggal 22 Juni 2021 bertempat di Inspektorat, menyatakan bahwa :

“Upaya yang mesti dilakukan yaitu seharusnya pada bulan-bulan berikutnya perangkat daerah agar memaksimalkan sumber daya manusia dan waktu yang tersedia, jika dibutuhkan perlu dilaksanakan kegiatan lembur kerja untuk menyelesaikan pekerjaan serta mengatur waktu pekerjaan sesuai jadwal”.

d. Informan 4

Farida Nurul Aini, ST, M. Eng, Jabatan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda, wawancara pada tanggal 21 Juni 2021 bertempat di Bagian Administrasi Pembangunan, menyatakan bahwa :

“sebagai bentuk upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja fisik kabupaten magelang adalah dengan mendorong SKPD agar menyusun rencana kerja operasional dengan cermat dan disiplin dalam pelaksanaan kegiatan sesuai yang tertuang dalam RKO. RKO jangan hanya menjadi formalitas saja. Yang kedua yaitu dengan memantau perkembangan tiap bulan, mendorong SKPD yang capaian fisiknya di bawah target untuk segera melakukan percepatan. Yang ketiga agar SKPD melaksanakan pengendalian internal dan aktif berkoordinasi dengan pihak terkait”.

e. Informan 5

Sulistyo Yuwono, SH, Jabatan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan setda, wawancara pada tanggal 23 Juni 2021 bertempat di Bagian Administrasi Pembangunan, menyatakan bahwa :

“ada dua upaya yang dapat dilakukan, secara formal harus ada aturan yang mengatur reward dan punishment untuk kasus keterlambatan, atau dengan memberikan toleransi angka deviasi. Yang kedua yaitu dengan peningkatan pengawasan pengendalian masing-masing SKPD atau pengendalian intern SKPD”.

f. Informan 6

Arif Yulianto, ST, Jabatan Kasubid Fispra pada Bappeda dan Litbangda, wawancara pada tanggal 23 Juni 2021 bertempat di Bappeda dan Litbangda, menyatakan bahwa :

“upaya yang harus dilakukan agar kinerja fisik mencapai target setiap bulannya yaitu tentunya harus konsekuen dengan jadwal yang mereka buat, juga didukung oleh kemampuan sumber daya manusia sehingga apa yang menjadi kelemahan sumber daya manusia itulah yang perlu ditingkatkan melalui Pendidikan dan pelatihan”.

Berdasar pendapat dari informan diketahui bahwa upaya yang harus dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan realisasi kinerja fisik agar sesuai target adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi dalam bidang penyusunan perencanaan daerah serta peningkatan sarana dan prasarana, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada untuk mempercepat kegiatan.
- 2) Membuat kebijakan yang mendukung proses percepatan kegiatan.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap SKPD yang capaian kinerja fisiknya rendah.
- 4) SKPD agar melakukan pengendalian intern dan koordinasi rutin dengan pihak terkait.

Pembahasan

Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahunan dan triwulanan. Pencapaian kinerja fisik dan keuangan selanjutnya dijabarkan dalam penetapan kinerja bulanan sebagaimana format laporan kegiatan bulanan.

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) meliputi laporan RFK 1A yang berisi kegiatan konstruksi berupa pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan. RFK 1B berisi laporan non konstruksi yang berupa kegiatan fasilitasi, pengadaan sarana

prasarana dan pemeliharaan non konstruksi. RFK 1C berisi rekapitulasi anggaran SKPD yang merupakan gabungan dari konstruksi dan non konstruksi. RFK 1D berisi laporan prosentase capaian pelaksanaan APBD kategori konstruksi dan RFK 1E berisi laporan prosentase capaian pelaksanaan APBD kategori non konstruksi.

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan/penyimpangan dalam kegiatan pelaksanaan APBD dan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan (keseimbangan antara kemajuan fisik dan penyerapan dana) serta untuk masukan terhadap penyusunan kebijakan di tahun yang akan datang, mestinya Perangkat Daerah diwajibkan untuk sebagai berikut:

1. Masing-masing PPTK menyusun RKO yang berisi gambaran umum indikator kinerja kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan target penggunaan anggaran. RKO disampaikan kepada Bupati lewat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan. RKO direvisi jika ada perubahan-perubahan yang signifikan.
2. Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) antara Bupati dengan DPRD.
3. Masing-masing PPTK menjabarkan jadwal pelaksanaan kegiatan dalam RKO dan realisasinya dalam format laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK).

Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing Perangkat Daerah menghimpun laporan RFK dari PPTK menjadi Laporan RFK tingkat Perangkat Daerah.

4. Untuk pekerjaan konstruksi, Pejabat Pembuat Komitmen menginput data kontrak, target, dan realisasi fisik per minggu dengan memanfaatkan aplikasi SIPENIDAKON.
5. Pada akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan akhir sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan keuangan lainnya.

Sebagai langkah awal agar kinerja fisik optimal sesuai dengan target yang ditetapkan, setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai bagian pembinaan dan pengendalian internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut meliputi:

1. Perangkat Daerah sebagai pengendali internal mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam DPA- Perangkat Daerah, meliputi realisasi fisik pencapaian target (kemajuan pelaksanaan kegiatan), penyerapan anggaran, serta kendala yang dihadapi;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pemantauan, supervisi, penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah serta menghimpun, menganalisis dan

menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah;

3. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian administrasi keuangan program/kegiatan yang didanai dari APBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Bagian Administrasi Pembangunan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah meliputi pelaporan atas pelaksanaan kegiatan, realisasi fisik dan keuangan kegiatan, serta deviasi/kesenjangan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Pada setiap awal perencanaan kegiatan PPTK menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO). RKO berisi gambaran umum indikator kinerja kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan target penggunaan anggaran. RKO disusun oleh PPTK diketahui oleh Pengguna Anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. RKO digunakan sebagai pedoman menentukan prosentase target fisik dan target keuangan kegiatan setiap bulan yang selanjutnya dituangkan dalam target-target pada Laporan RFK, serta digunakan sebagai acuan dalam menentukan anggaran kas pada suatu kegiatan.

a. Pengendalian internal

Pengendalian kegiatan di lingkup Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah antara lain melalui pengendalian administrasi, pengendalian teknis, pengawasan lapangan, pengujian laborat.

b. Pengendalian eksternal

Pengendalian eksternal dilakukan secara umum pada semua kegiatan sebagai implementasi dari pelaksanaan anggaran. Pengendalian eksternal oleh Bupati dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Bagian Administrasi Pembangunan melakukan penilaian kinerja Perangkat Daerah setiap triwulan berdasarkan indikator realisasi fisik, deviasi antara target fisik dengan realisasi fisik, ketertiban Perangkat Daerah dalam mengirimkan laporan, serta kelengkapan format laporan dari Perangkat Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi kinerja fisik kurang optimal atau tidak sesuai target adalah sumber daya manusia dalam membuat sistem perencanaan kegiatan belum memadai dan menguasai kegiatan atau kemampuan untuk menyelesaikan kegiatan, sarana dan prasarana kegiatan yang belum memadai, adanya perubahan regulasi yang menyebabkan penyesuaian dalam batas waktu singkat sehingga menyebabkan Sumber daya manusia dan sarana prasarana tidak

siap, serta masih ada faktor eksternal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti adanya gagal lelang.

2. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja fisik agar sesuai target yang ditetapkan yaitu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi dalam bidang penyusunan perencanaan daerah serta peningkatan sarana dan prasarana, memaksimalkan sumber daya manusia yang ada untuk mempercepat kegiatan, membuat kebijakan yang mendukung proses percepatan kegiatan, melakukan pengawasan terhadap SKPD yang capaian kinerja fisiknya rendah, serta menekankan SKPD agar melakukan pengendalian intern dan koordinasi rutin dengan pihak terkait.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai Magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah (semanah) perlu menekankan pada pencapaian kegiatan fisik dengan memahami faktor-faktor penyebab belum optimalnya capaian kinerja fisik. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan meningkatkan sarana prasarana, memberikan dukungan dalam bentuk *reward* dan *punishment* atas capaian kinerja SKPD.
2. Perlu adanya ketegasan dalam mengupayakan segala bentuk pendapat pemecahan permasalahan agar segera dapat melakukan evaluasi dari upaya-upaya yang dilakukan. Pengawasan ketat terhadap proses pengadaan dan memberikan kemudahan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Binti Zulaikah dan Dian Imanina Burhany, 2019, Faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV di Kota Cimahi.
- Deiby Isilda Alumbida, David P.E. Saerang, Ventje Ilat, Pengaruh perencanaan, kapasitas sumberdaya manusia, dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Indrawati, 2018, Monitoring Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pacitan.
- Nur Rochmah Siti, 2015, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada kota dan kabupaten di Jawa Tengah tahun 2009-2012).
- Siweko Yuwono, 2007, Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Keinginan Karyawan Berindah Kerja (Studi kasus pada karyawan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) AL IKHLAS Prambanan.
- Sugiyono, (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono Hari, 2011, Analisis Hubungan Kualitas SDM PNS dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 33 Thn 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2018.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Magelang Tahun 2019.

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Magelang Tahun 2020.

<https://core.ac.uk/download/pdf/230768731.pdf> PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY.

Alayyal Khikmah Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
alayyal_khikmah@yahoo.com

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/32TAHUN2004UU>

<https://media.neliti.com/media/publications/220750-optimalisasi-peningkatan-kinerja-perangk.pdf> Optimalisasi Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Perspektif Kualitas Sumber Daya Aparatur oleh IWAN SATIBI (Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pasundan Jawa Barat)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi Empiris pada Dinas Kementerian Agama Kota Surabaya)

<https://eprints.uny.ac.id/23987/4/BAB%20II.pdf>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah>

<http://satpoldamkar.mukomukokab.go.id/file/download/405C1324899D6285F75B.pdf>

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Thn 2006

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

[HOME](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief:



Sulastiningsih

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Managing Editor:



Beta Asteria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Editorial Board:



John Suprihanto

Universitas Gadjahmada Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



H.M. Awal Satrio

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



Suhartono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)



Suci Utami Wikaningtyas

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia
[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Publication and Content Editor:

Agung Slamet Prasetyo
Siti Khotimah

Make a Submission

INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

EDITORIAL POLICIES

[Publication Ethic](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewer](#)

[Focus and Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Frequency](#)

[Publication fee](#)

[Plagiarism Checker](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Ethical Statement](#)

[Publisher](#)

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

3026-0469

ISSN 3026-0469



TOOLS

[zotero](#)

[Mendeley](#)

INDEXING LIST

[Crossref](#)

Support By

ijirelawan
JURNAL INDONESIA

VISITORS

